

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa memiliki persoalan dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduknya, target surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan suatu tantangan yang memerlukan kerja keras dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan semakin berkurangnya lahan guna pembuatan areal sawah baru maka program intensifikasi pertanian merupakan pilihan yang tepat. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi bahwa irigasi berfungsi mendukung produktifitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pembangunan irigasi di Indonesia sudah dimulai sejak jaman kolonialisasi Belanda pada awal abad ke-20 yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia sampai saat ini. Saat ini Indonesia memiliki luas lahan irigasi nasional sebesar 7.230.183 Ha, Pulau Jawa sebagai sentra padi nasional

memiliki 46 % luas irigasi nasional yang kemudian disusul Pulau Sumatera sebesar 28 % luas irigasi nasional dan selanjutnya Pulau Sulawesi sebesar 12 %. Untuk daerah Jawa dan Sumatera khususnya, jaringan irigasi yang ada merupakan hasil pembangunan di awal pengembangan irigasi Indonesia (baik sejak jaman kolonial, maupun awal Repelita) yang rata-rata telah berumur lebih dari 20 tahun. Dengan bertambahnya umur bangunan-bangunan air di jaringan irigasi sejak waktu pelaksanaan konstruksi, secara alami maupun pengaruh dari ulah manusia yang tak bertanggung jawab akan terjadi penurunan fungsi dari bangunan tersebut, sedangkan tuntutan kebutuhan pembagian air irigasi yang efisien di seluruh tingkatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan tanaman sangat diperlukan.

Sesuai tahapan Survey, Investigation, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance (SIDLACOM) , setelah kegiatan konstruksi pembangunan jaringan Irigasi proses lanjutan adalah kegiatan operasi dan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar fungsi pelayanan irigasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk menunjang usaha-usaha sektor pertanian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah mengamanatkan bahwa pembiayaan pelaksanaan konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan sistem irigasi di jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran serta

masyarakat petani; dan bahwa pembiayaan pelaksanaan konstruksi sistem irigasi tersier menjadi tanggungjawab petani dan dapat dibantu pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk tahun anggaran 2011 ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menganggarkan dana sebesar Rp.1.099.549.846.000,00.- guna keperluan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Alokasi dan teknis penggunaan dana tersebut dilaksanakan secara langsung oleh kementerian secara vertikal melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) / Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun di Tugas Pembantuan (TP) melalui dinas-dinas di tiap provinsi maupun kabupaten.

No	Kegiatan	Unit	Sasaran Renstra
1	Pembangunan Baru	Ha	500,000
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Ha	1,342,870
3	O & P	Ha	2,341,363

Gam bar 1. RENSTRA Irigasi 2010 - 2014

Provinsi Lampung melalui Dinas Pengairan dan Pemukiman merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TP-OP) Jaringan Irigasi. Tugas Pembantuan ini telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2007 hingga saat ini tahun anggaran 2013. TP-OP yang dilaksanakan oleh Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung ini meliputi pekerjaan : operasi rutin, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala yang dilaksanakan di 9 (sembilan) Daerah Irigasi (D.I) yaitu : D.I.

Way Tebu System, D.I. Way Seputih, D.I. Way Sekampung, D.I. Way Curup, D.I. Way Jepara, D.I. Way Pengubuan, D.I. Way Rarem, D.I. Way Tulung Mas, dan D.I. Way Umpu dengan luas total 137.107 Ha.

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan tepat guna dan sarannya pelaksanaan kegiatan TP-OP Jaringan Irigasi di Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung yang ditinjau dari aspek penyerapan dan tujuan penggunaan anggaran dana.

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan usulan-usulan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan penggunaan anggaran dana TP-OP dengan menjadikan Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2009 dan 2010 sebagai tinjauan penelitian.

1.3. Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini mencakup perhitungan komposisi penyerapan dan tujuan penggunaan anggaran TP-OP pada tahun anggaran 2009 dan 2010. Data-data sekunder yang telah didapatkan akan diolah dan hasilnya dianalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan yang diharapkan dapat usulan kebijakan dalam pelaksanaan TP-OP.

Dengan membandingkan pelaksanaan pada dua tahun anggaran (2009 dan 2010) diharapkan ada perbandingan kinerja dan permasalahan-permasalahan serta solusi dari tiap tahun anggaran yang telah dilaksanakan. Data-data yang dianalisa adalah data pelaksanaan kegiatan TP-OP di sembilan Daerah Irigasi di Provinsi Lampung yang diperoleh dari tiga wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Semangka, UPTD Seputih-Sekampung, UPTD Mesuji –Tulang Bawang dan Satuan Kerja (Satker) Dinas Pengairan dan Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Tugas Perbantuan (TP) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi merupakan suatu bentuk aplikasi kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para petani pemakai air irigasi yang akan berdampak bagi ketahanan pangan nasional. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Adanya evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan Tugas Perbantuan Operasi Pemeliharaan (TPOP) satuan kerja Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan 2010
2. Dari evaluasi tersebut diatas akan ditemukan kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai suatu acuan bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

3. Meningkatnya manfaat dan daya guna dari kegiatan Tugas Perbantuan Operasi Pemeliharaan (TPOP) baik secara langsung kepada masyarakat pengguna air irigasi, Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Sumber Daya Air selaku pemutus kebijakan, dan Satuan Kerja Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung selaku pelaksana kebijakan.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab I yang merupakan pendahuluan dari tesis ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, lingkup penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian. Bab II terdiri dari kajian secara menyeluruh terhadap pustaka terkait dengan pembahasan tesis ini.

Bab III menguraikan secara rinci metode dan semua tahapan yang dilakukan dalam penelitian, data yang dibutuhkan, pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian serta cara analisis atau pengolahan datanya. Bab IV memuat seluruh data yang diperoleh dan hasil pengolahan data tersebut beserta pembahasannya.

Bab V berisi kesimpulan yang memuat hasil-hasil penting dari penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab

sebelumnya, bab ini juga menguraikan saran-saran yang diperlukan guna penyempurnaan hasil penelitian.

1.6. Hipotesis Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Operasi Pemeliharaan (TP-OP) Jaringan Irigasi setiap tahun anggarannya (Tahun Anggaran 2009 dan 2010), masing-masing tahun anggaran memiliki karakter permasalahan-permasalahan dan penyelesaian yang berbeda-beda. Perbedaan ini mungkin timbul karena faktor-faktor teknis maupun non teknis dilapangan, nilai anggaran yang berbeda, bahkan mungkin juga disebabkan faktor manajerial yang berbeda. Oleh karena itu penulis berhipotesis bahwa efektifitas dan daya manfaat serta pencapaian tujuan kegiatan TP-OP pada tahun anggaran 2009 dan 2010 berbeda. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan guna mengetahui secara lebih mendetail.